

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat – syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

YUNINDRA ARMAN FAUZI

B200 050 254

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka otonomi ini dititik beratkan pada daerah Kabupaten/Kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah propinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal I ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam otonomi suatu daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri didalam membiayai kegiatan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian terbesar dalam mobilisasi dana

penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu sudah sewajarnya PAD dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk mengetahui apakah suatu pemerintah daerah telah siap menjalankan otonomi daerah dapat dilakukan dengan suatu analisis terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dalam mengelola keuangan daerah dapat digunakan alat penilaian berupa analisis rasio keuangan APBD.

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis rasio keuangan sebagai salah satu alat analisis telah banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga atau organisasi yang bersifat profit oriented, namun masih jarang yang dilakukan pada lembaga atau organisasi non-profit oriented khususnya pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan serta sifat dan cakupan yang berbeda.

Tolok ukur kinerja, adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-masing daerah. Untuk menilai kinerja digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut : *Input* (masukan), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber : dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. *Output* (keluaran) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. *Outcome* (hasil) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. *Benefit* (manfaat) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil. *Impact* (Dampak) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat. (Fadilah dan Muhtar, 1004:32)

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manejer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang

public tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. (Mardiasmo, 2002:121)

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mengatur wilyahnya sendiri atau merupakan daerah otonomi . Kabupaten Karanganyar merupakan daerah otonomi yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang maksimal diharapkan dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Karanganyar Memiliki potensi besar untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah karena Kabupaten Karanganyar memiliki aset pariwisata dan faktor pendukung pariwisata seperti hotel,vila,dsb. yang merupakan sumber penerimaan pajak Pemda Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah bagaimana kinerja keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada kinerja keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2004-2007.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2004-2007.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang diantaranya:

1. Bagi Pemda Karanganyar

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menjadi tolok ukur menilai kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan digunakan untuk menentukan kebijakan bagi Pemda Karanganyar dalam menyusun APBD, karena dari analisis rasio keuangan tersebut dapat diketahui perbedaan kondisi keuangan setiap periode. Perbedaan kondisi keuangan tersebut disebabkan oleh penerimaan dan pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang mata kuliah yang menyangkut sektor public karena dapat mengaplikasikan

lansung ilmu yang didapat dari masa kuliah khususnya menyangkut Akuntansi Sektor Publik.

3. Bagi akademik

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi orang lain yang akan melakukan penelitian berikutnya mengenai lembaga Sektor Publik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian yang meliputi ; Otonomi Daerah, Akuntansi Pemerintahan, Tinjauan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah, Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup gambaran umum organisasi pemerintah daerah kabupaten Karanganyar dan hasil analisis rasio.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan, dan saran-saran.